

**DINAMIKA KEAMANAN PERBATASAN DI PULAU SEBATIK DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA****Marissa Safira Dinanti<sup>1</sup>, Atika Puspita Marzaman<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia[1marissasafira24@gmail.com](mailto:marissasafira24@gmail.com), [2tika.marzaman@gmail.com](mailto:tika.marzaman@gmail.com)**Abstrak**

Pulau Sebatik sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menghadapi berbagai tantangan kompleks, termasuk lemahnya pengawasan, tingginya aktivitas lintas batas ilegal, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap Malaysia, serta ketiadaan batas fisik yang jelas. Ketegangan ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya fasilitas keamanan, dan ketidaksesuaian antar aktor terkait, yang mengancam stabilitas kawasan dan hubungan bilateral kedua negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Sekuritisasi dan teori Interdependensi Kompleks, dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah perbatasan di Pulau Sebatik memerlukan solusi holistik yang mencakup diplomasi aktif, peningkatan infrastruktur perbatasan, penguatan kapasitas keamanan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pendekatan ini tidak hanya penting untuk menjaga kedaulatan nasional tetapi juga untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Malaysia secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pulau Sebatik, perbatasan, keamanan, hubungan bilateral, sekuritisasi, interdependensi kompleks, diplomasi, Indonesia-Malaysia.

**Abstract**

*Sebatik Island, situated on the Indonesia-Malaysia border, faces various complex challenges, including weak surveillance, high levels of illegal cross-border activity, local economic dependence on Malaysia, and the absence of clearly defined physical boundaries. These tensions are exacerbated by weak law enforcement, inadequate security infrastructure, and a lack of coordination among relevant actors, all of which threaten regional stability and the bilateral relationship between the two countries. This study adopts the Securitization Theory and the Complex Interdependence Theory, using a qualitative method based on literature review. The findings indicate that border issues in Sebatik Island require a holistic solution involving active diplomacy, improved border infrastructure, enhanced security capacity, and the empowerment of the local economy. Such an approach is essential not only for safeguarding national sovereignty but also for sustainably strengthening Indonesia-Malaysia bilateral relations.*

**Keywords:** *Sebatik Island, border, security, bilateral relations, securitization, complex interdependence, diplomasi, Indonesia-Malaysia.*

**Article History**

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia menempati posisi yang strategis secara geopolitik dan geoekonomi, baik di tingkat regional maupun internasional, karena terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dengan jumlah 17.380 pulau pada tahun 2024 dan luas wilayah perairan mencapai 6,4 juta km<sup>2</sup>. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia melalui darat meliputi Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Selain itu, Indonesia juga berbatasan secara maritim dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Perbatasan darat Indonesia mencakup tiga wilayah utama: perbatasan dengan Malaysia sepanjang 2.026 kilometer di Pulau Kalimantan; perbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 821,1 kilometer di wilayah Papua; serta perbatasan dengan Timor Leste sepanjang 268,8 kilometer di Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Di sisi positif, kedekatan geografis memungkinkan Indonesia untuk lebih mudah menjalin kerja sama di berbagai bidang dengan negara-negara tetangga. Namun, di sisi negatif, luasnya wilayah perbatasan menuntut kesiapan Indonesia untuk menjaga dan melindunginya dari berbagai ancaman yang tidak diinginkan. Selain itu, wilayah perbatasan sering kali menjadi sumber konflik atau sengketa antarnegara.

Permasalahan di wilayah perbatasan mencakup aspek sosial ekonomi, pertahanan, dan ketergantungan terhadap negara tetangga. Secara sosial ekonomi, wilayah ini tertinggal dalam pembangunan akibat keterpencilan, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, serta tingginya angka kemiskinan. Ketimpangan ini diperparah oleh rendahnya akses informasi dan layanan pemerintah, terutama di wilayah-wilayah *blank spot*. Dari sisi pertahanan dan keamanan, luasnya wilayah perbatasan dan sebaran penduduk yang tidak merata menyulitkan pengawasan, sementara lemahnya sinergi antarinstansi. Ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi negara tetangga juga menimbulkan kerawanan, baik dari sisi ekonomi, seperti ketidakstabilan harga dan perdagangan, maupun dari sisi politik, yang dapat memengaruhi hubungan antarnegara (Marwasta, 2016). Selain itu, permasalahan ini dipengaruhi oleh lemahnya paradigma pembangunan yang masih bersifat sentralistik dan *top-down*. Artinya, kebijakan lebih banyak dipandang dari perspektif pusat tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal (Tirtosudarmo & Haba dalam Ghafur, 2016). Koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan kebijakan yang kurang terstruktur, sementara keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya penegakan hukum memicu berbagai pelanggaran lintas negara. Semua kondisi ini menjadi hambatan serius dalam pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan, termasuk di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Pulau Sebatik merupakan kawasan perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah Sebatik Indonesia saat ini terbagi menjadi lima kecamatan: Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Utara, dan Sebatik Tengah. Dua kecamatan terakhir, yaitu Sebatik Utara dan Sebatik Tengah, menjadi wilayah yang langsung berbatasan dengan Malaysia (Ghafur, 2016). Pulau Sebatik juga dikategorikan sebagai salah satu Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia karena berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia.



Gambar 1. Peta Pulau Sebatik

Sumber: <https://www.google.com/maps/@4.1516966,117.6288151,10z>  
(Diakses 1 Mei 2025)

Secara geografis, bagian timur dan selatan pulau ini berbatasan dengan Laut Sulawesi, bagian barat dengan Selat Nunukan, dan bagian utara dengan wilayah Sabah (Siburian, 2012) dalam (Fathussyakina, 2024). Pulau ini terbagi menjadi dua wilayah kedaulatan, yakni bagian selatan seluas 246,61 km<sup>2</sup> merupakan wilayah Indonesia, sementara bagian utara seluas 187,23 km<sup>2</sup> termasuk dalam negara bagian Sabah, Malaysia. Selain itu, Pulau Sebatik termasuk dalam kategori *Outstanding Boundary Problem* (OBP), yakni permasalahan batas negara yang belum terselesaikan terkait penentuan garis batas negara antara Indonesia dan Malaysia di sektor timur, tepatnya pada kawasan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Sabah, Malaysia (Fathussyakina, 2024).

Permasalahan di wilayah perbatasan, khususnya Pulau Sebatik, mencakup tiga dimensi utama yaitu keamanan, sosial-ekonomi, dan diplomasi. Dari perspektif keamanan, aktivitas lintas batas ilegal, seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya, terus meningkat akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan infrastruktur keamanan (Nalindro et al., 2022). Aktivitas ini tidak hanya mengancam stabilitas lokal tetapi juga memperburuk hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Dari sisi sosial-ekonomi, masyarakat di Pulau Sebatik memiliki ketergantungan yang signifikan pada Malaysia, khususnya Kota Tawau, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh kedekatan geografis serta keterbatasan akses barang dari wilayah Indonesia lainnya. Produk Malaysia, yang sering kali lebih murah dan mudah didapat, mendominasi pasar lokal. Survei menunjukkan bahwa lebih dari 70% kebutuhan pokok masyarakat Sebatik berasal dari Malaysia, mulai dari bahan makanan hingga bahan bakar (Nugroho et al., 2023). Ketergantungan ini menciptakan dilema antara kebutuhan lokal dan upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Dari perspektif diplomasi, perbedaan interpretasi terhadap Konvensi Perbatasan 1891 sering kali memicu ketegangan diplomatik. Sengketa ini diperburuk oleh tidak jelasnya garis batas fisik di lapangan, yang memungkinkan terjadinya insiden antara aparat keamanan kedua negara (Marbun et al., 2025).

Dinamika yang terjadi tidak hanya memengaruhi masyarakat lokal, tetapi juga membawa implikasi yang lebih luas terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, baik dari segi diplomatik, ekonomi, maupun keamanan kawasan. Hubungan kedua negara sering kali diuji oleh insiden di perbatasan, baik yang melibatkan masyarakat maupun otoritas keamanan, yang berpotensi memicu ketegangan diplomatik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika keamanan perbatasan di Pulau Sebatik serta menelaah bagaimana isu tersebut memengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.

## KAJIAN TEORITIS

### A. Teori Sekuritisasi (*Securitization Theory*)

Teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh *Copenhagen School* melalui tokoh-tokoh seperti Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, menawarkan pendekatan kritis terhadap studi keamanan yang menekankan bahwa isu keamanan bukanlah sesuatu yang objektif atau tetap, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk melalui tindakan diskursif atau *speech acts*. Suatu isu hanya dapat dianggap sebagai ancaman keamanan apabila ada aktor sekuritisasi—seperti pemerintah, militer, atau media—yang berhasil meyakinkan audiens tertentu bahwa isu tersebut membutuhkan respons luar biasa di luar mekanisme politik normal (Yudhistira, 2022). Proses sekuritisasi terdiri dari tiga elemen utama: (1) aktor sekuritisasi, yaitu pihak yang membingkai suatu isu sebagai ancaman; (2) objek referensi yang dianggap terancam, seperti negara, masyarakat, atau sistem ekonomi; dan (3) audiens yang perlu diyakinkan untuk menerima narasi tersebut. Keberhasilan sekuritisasi bergantung pada legitimasi ancaman yang dikonstruksikan dan sejauh mana audiens menerima perlunya tindakan luar biasa (Trihartono et al., 2020). Teori ini juga membuka ruang untuk menganalisis isu-isu non-tradisional seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, migrasi, dan perbatasan sebagai isu keamanan yang setara dengan ancaman militer.

Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki risiko. Ketika sekuritisasi dilakukan secara agresif, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang atau aspek kemanusiaan, respons yang muncul dapat menjadi represif dan kontraproduktif. Contohnya dapat dilihat dalam kebijakan penanganan pencari suaka oleh pemerintah Australia, di mana sekuritisasi mengarah pada kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan memperburuk relasi internasional (Soesilowati, 2014). Oleh karena itu, teori sekuritisasi juga menuntut kehati-hatian dalam penerapannya, khususnya dalam konteks hubungan bilateral.

### B. Teori Interdependensi Kompleks (*Complex Interdependence Theory*)

Teori Interdependensi Kompleks (*Complex Interdependence Theory*) yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye menawarkan perspektif alternatif terhadap pendekatan realis dalam hubungan internasional. Teori ini menekankan bahwa hubungan antarnegara tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer, tetapi juga pada keterkaitan ekonomi, sosial, dan politik yang saling bergantung. Dalam konteks ini, penggunaan kekuatan militer cenderung dihindari karena dapat merugikan semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai gantinya, negara-negara lebih memilih pendekatan kooperatif dan multilateral yang mengedepankan dialog dan diplomasi untuk menjaga stabilitas bersama (Ramli et al., 2024).

Teori ini juga menyoroti bahwa tidak ada hierarki isu dalam hubungan internasional—isu ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat memiliki urgensi yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan isu militer. Ancaman terhadap stabilitas global tidak selalu berbentuk konflik bersenjata, melainkan juga bisa berupa krisis non-tradisional seperti bencana lingkungan atau keruntuhan ekonomi. Dalam kondisi ini, negara-negara saling bergantung melalui banyak saluran interaksi, baik antarnegara maupun dengan aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan masyarakat sipil. Pola interaksi yang kompleks ini memperkuat jejaring interdependensi lintas sektor dan mendorong pendekatan hubungan internasional yang lebih kolaboratif (Ramli et al., 2024).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Data diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, laporan penelitian, dan artikel dari media kredibel. Fokus utama dari metode ini adalah menggali informasi dan konsep dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dinamika keamanan perbatasan di Pulau Sebatik serta implikasinya terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dinamika Keamanan Perbatasan di Pulau Sebatik

Dinamika keamanan di wilayah perbatasan Pulau Sebatik tidak hanya terkait pada aspek kedaulatan, tetapi juga pada isu ekonomi dan sosial. Salah satu ancaman signifikan adalah penyelundupan barang dan aktivitas lintas batas ilegal, yang sering kali memanfaatkan celah akibat tidak jelasnya garis batas negara. Hal ini menjadi tantangan besar bagi otoritas keamanan kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia, dalam menjaga stabilitas wilayah. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi lintas batas yang tidak terkontrol semakin mempersulit upaya penegakan hukum. Di sisi lain, dinamika ini turut memengaruhi hubungan masyarakat lintas batas yang memiliki keterkaitan budaya dan sosial yang erat antara penduduk Sebatik Indonesia dan Malaysia. Interaksi ini menciptakan peluang untuk kerja sama, tetapi juga memunculkan tantangan dalam pengelolaan keamanan perbatasan. Ketegangan politik di tingkat nasional juga dapat merembes ke hubungan masyarakat lokal, memperkeruh situasi keamanan.

Masyarakat di Pulau Sebatik hingga kini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar ini menjadi masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Letak geografis Pulau Sebatik yang lebih dekat dengan Kota Tawau dibandingkan dengan wilayah NKRI lainnya menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan lintas batas antara kedua negara. Barang-barang dari Malaysia, seperti bahan makanan, bahan bangunan, dan bahan bakar, lebih mudah diakses dan terjangkau. Kondisi ini memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap produk Malaysia, yang ironisnya melemahkan daya saing produk domestik (Kurnia, 2018).

Dalam kenyataannya, dinamika keamanan di Pulau Sebatik masih tergolong lemah. Kurangnya pengawasan dari aparat keamanan dan terbatasnya infrastruktur pendukung menjadikan wilayah ini rawan terhadap aktivitas lintas batas yang tidak resmi, seperti masuknya produk-produk Malaysia tanpa melalui prosedur bea cukai. Fenomena ini mencerminkan lemahnya kontrol negara terhadap lalu lintas barang di perbatasan dan menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat lokal dan upaya menjaga kedaulatan wilayah (Siregar et al., 2020). Ketergantungan masyarakat pada barang impor dari Malaysia menciptakan ketegangan tersendiri. Di satu sisi, barang-barang tersebut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih efisien, sementara di sisi lain, kondisi ini melemahkan pengaruh ekonomi domestik di wilayah perbatasan.

Produk Malaysia menjadi pilihan karena kualitasnya yang lebih baik, harga yang lebih terjangkau, serta ketersediaan bahan pokok yang melimpah. Hal ini memungkinkan kebutuhan seluruh penduduk di wilayah Sebatik dapat terpenuhi dengan baik (Nugroho et al., 2023). Daya tarik ini, terutama bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, membuat produk Malaysia menjadi dominan di Pulau Sebatik. Ironisnya, produk dalam negeri sendiri justru lebih jarang ditemukan di wilayah ini. Jika dilakukan survei ke rumah-rumah warga Sebatik, hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar kebutuhan sehari-hari mereka berasal dari Malaysia, mulai dari kebutuhan dapur seperti gas memasak, hingga bahan bangunan seperti batu gunung (Siburian, 2012). Mereka sangat bergantung pada sembilan jenis barang kebutuhan pokok (dikenal sebagai Sembilan Bahan Pokok - SEMBAKO) seperti beras, gula, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, minyak goreng, telur, garam, minyak, dan bensin (Dollah, 2025).

Harga barang yang dibeli dari Kota Tawau umumnya lebih murah dibandingkan dengan barang-barang dari Nunukan. Selain bahan makanan, penduduk Pulau Sebatik juga membeli kebutuhan bangunan seperti semen, seng, paku, hingga bahan bakar minyak (BBM) seperti bensin dan solar. Mereka juga membeli barang penting lainnya seperti mesin diesel dan alat telekomunikasi, dengan volume dan nilai perdagangan yang sulit dilacak secara resmi karena transaksi tidak terpantau atau tercatat secara formal (Kurnia, 2018). Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa kegiatan penyelundupan, kegiatan ekonomi gelap dan abu-abu lainnya serta dinamika ketenagakerjaan telah menjadi perhatian yang mendesak di kawasan ini (Sarjono et al., 2022).

Keterbatasan infrastruktur di Pulau Sebatik juga memperparah situasi. Kurangnya pos pengamanan dan akses transportasi memadai menyulitkan aparat untuk melakukan patroli rutin secara efektif. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi seperti TNI, Polri, dan Bea Cukai menjadi kendala penegakan hukum. Fasilitas keamanan di wilayah ini mencakup 2 Polsek dan 4 Polsubsektor yaitu Polsek Sebatik Timur dengan 1 Polsubsektor Sebatik dengan 29 personel. Polsubsektor Sebatik membawahi Kecamatan Sebatik, Sebatik Timur, dan Sebatik Utara. Kemudian untuk Polsek Sebatik Barat terdapat 3 Polsubsektor dan membawahi Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik Tengah dengan 28 personel untuk melayani sekitar 47.571 jiwa penduduk Pulau Sebatik (Nalindro et al., 2022).

Dalam hal keimigrasian, Pos Imigrasi Sebatik hanya melayani Pas Lintas Batas (PLB) tanpa kewenangan menerbitkan paspor. Pembuatan paspor hanya dapat dilakukan di Nunukan, yang jaraknya cukup jauh dan hanya dapat ditempuh melalui jalur laut. Pas Lintas Batas (PLB) adalah dokumen khusus yang berlaku di Pulau Sebatik untuk melintas ke Malaysia, khususnya Kota Tawau. Namun, penggunaannya kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, baik untuk kejahatan lintas negara maupun sebagai jalur bagi TKI ilegal. Status administrasi Pulau Sebatik yang masih berupa kecamatan turut menghambat pengembangan fasilitas negara. Pos Imigrasi Sebatik sulit ditingkatkan menjadi Kantor Imigrasi, dan penambahan personel kepolisian juga terhambat karena Polsek belum dapat ditingkatkan statusnya (Basundoro, 2013).

Kondisi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Sebatik masih sangat terbatas. Keterbatasan personel pengamanan membuat pengawasan perbatasan tidak optimal, baik di wilayah darat, laut, maupun udara. Hanya terdapat satu PLBN, yaitu PLBN Sei Pancang di Kecamatan Sebatik Utara, yang belum mampu memenuhi kebutuhan pengawasan yang efektif. Fasilitas imigrasi yang terpusat di Nunukan mempersulit masyarakat Sebatik yang ingin melakukan perjalanan resmi, sehingga aktivitas lintas batas ilegal semakin tinggi (Nugroho, 2024).

Pada akhirnya, pengelolaan keamanan perbatasan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek penegakan hukum, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan memberikan perhatian lebih pada pengembangan wilayah perbatasan untuk menjawab kebutuhan masyarakat lokal serta menjaga kedaulatan negara.

## B. Implikasi terhadap Hubungan Bilateral Indonesia - Malaysia

Permasalahan perbatasan di Pulau Sebatik memberikan dampak signifikan terhadap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Konflik perbatasan yang belum terselesaikan, terutama perbedaan interpretasi terhadap dokumen hukum seperti Konvensi Perbatasan 1891 dan pergeseran pilar batas, telah menjadi sumber ketegangan. Masalah ini tidak hanya menyentuh isu kedaulatan dan kejelasan garis batas teritorial, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Ketidakpastian garis batas menciptakan kerentanan di kedua sisi perbatasan, memengaruhi stabilitas hubungan diplomatik kedua negara.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur diplomasi. Pendekatan diplomasi perbatasan sebagai instrumen politik luar negeri telah diupayakan untuk menangani masalah perbatasan darat maupun laut. Salah satu upaya yang signifikan adalah pembentukan forum seperti *Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM)*. JIM adalah forum bilateral yang dibentuk oleh Indonesia dan Malaysia untuk menangani isu-isu perbatasan, khususnya terkait survei dan demarkasi batas internasional antara kedua negara dan mencari solusi damai. Pertemuan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1974 dan terus berlanjut hingga saat ini. Proses negosiasi dalam JIM berfokus pada dialog intensif untuk mengatasi perubahan fisik di lapangan dan menyelesaikan perbedaan pandangan hukum. Tujuan utamanya adalah menghasilkan kesepakatan formal dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* (Fathussyakina, 2024).

Sebagai bukti keberlanjutannya, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melangsungkan pertemuan JIM sebanyak 45 kali. JIM terakhir dilaksanakan di Jakarta Barat pada 17-18 Februari 2025. Pertemuan ini membahas hasil kegiatan bersama tim teknis dari kedua negara yang dilakukan antara 28 Juli 2023 hingga 16 Februari 2025, termasuk laporan kemajuan bersama dari Komite Teknis tentang demarkasi dan survei batas internasional antara Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat) dan Malaysia (Sabah & Sarawak) (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2025). Keberlanjutan JIM ini memang mencerminkan pendekatan diplomasi perbatasan yang konsisten dan terstruktur antara Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan perbedaan pandangan hukum serta perubahan fisik di lapangan. Namun, pendekatan *bottom-up* yang digunakan dalam proses negosiasi sering kali memperlambat penyelesaian. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, alternatif seperti arbitrase internasional atau penyelesaian melalui Mahkamah Internasional juga dapat dipertimbangkan untuk mempercepat hasil yang lebih konkret.

Dalam upaya menjaga stabilitas, Indonesia dan Malaysia juga telah meningkatkan koordinasi keamanan perbatasan melalui program seperti *Coordinated Operations Control Center (COCC)*. Program ini dirancang untuk mencegah aktivitas lintas batas ilegal, termasuk penyelundupan barang dan perdagangan manusia, yang sering kali menjadi ancaman utama di wilayah ini. Langkah ini diiringi dengan revisi *Border Trade Agreement (BTA)*, yang memungkinkan perdagangan lintas batas negara dilakukan secara legal. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sei Pancang menjadi langkah penting untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di Pulau Sebatik. PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengawasan, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan yang rentan (Marbun et al., 2025). Menurut laporan Kementerian Luar Negeri (2023), langkah-langkah ini berhasil meningkatkan kontrol terhadap aktivitas lintas batas hingga 30% dalam dua tahun terakhir (Kementerian Luar Negeri, 2023).

Masyarakat Pulau Sebatik, di sisi lain, masih menghadapi tantangan besar terkait ketergantungan ekonomi terhadap Malaysia. Kedekatan geografis dengan Kota Tawau membuat barang-barang kebutuhan pokok dari Malaysia lebih mudah diakses dan lebih murah dibandingkan barang domestik Indonesia. Ketergantungan ini melemahkan daya saing produk lokal dan berpotensi mengurangi kedaulatan ekonomi Indonesia di wilayah perbatasan. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi ketergantungan ini dengan

meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan penyediaan infrastruktur logistik yang lebih baik (Kementerian Perindustrian, 2023). Program-program ini bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat perbatasan, sekaligus memperkuat rasa nasionalisme mereka terhadap Indonesia.

Hingga saat ini, permasalahan perbatasan di Pulau Sebatik belum mencapai kesepakatan akhir antara Indonesia dan Malaysia. Ketegangan yang dipicu oleh ketergantungan ekonomi terhadap Malaysia, ketiadaan batas fisik yang jelas, lemahnya penegakan hukum, minimnya fasilitas keamanan dan administrasi, serta ketidaksesuaian antara aktor-aktor terkait di kedua negara, telah menciptakan dinamika yang kompleks. Situasi ini tidak hanya memperkuat dilema antara kebutuhan lokal dan kedaulatan nasional tetapi juga memberikan tekanan tambahan pada hubungan bilateral. Ketidakmampuan untuk mengelola isu-isu ini secara efektif dapat menjadi indikator yang memperburuk hubungan diplomatik dan kerja sama bilateral. Oleh karena itu, pendekatan kerja sama yang lebih inklusif dan koordinasi lintas sektor yang harmonis sangat diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan.

## KESIMPULAN

Permasalahan di Pulau Sebatik menunjukkan bahwa wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pengawasan, infrastruktur, hingga ketergantungan ekonomi masyarakat lokal terhadap Malaysia. Ketiadaan batas fisik yang jelas, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya fasilitas keamanan dan administrasi, telah membuka ruang bagi aktivitas lintas batas ilegal yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap barang-barang dari Malaysia menjadi dilema antara kebutuhan praktis sehari-hari dan upaya menjaga kemandirian serta integritas wilayah. Implikasi dari kondisi ini tidak hanya dirasakan pada tataran lokal, tetapi juga berdampak pada dinamika hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Ketegangan yang muncul akibat sengketa perbatasan dan aktivitas ilegal berisiko memperkeruh hubungan diplomatik jika tidak ditangani secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi yang mencakup diplomasi aktif, peningkatan infrastruktur perbatasan, penguatan kapasitas keamanan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Strategi ini penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional, tetapi juga untuk memperkuat kerja sama bilateral yang konstruktif dan berkelanjutan antara kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basundoro, P. (2013). "Pulau Sebatik sebagai Pintu Kecil Hubungan Indonesia- Malaysia (Sebatik Island As A Small Door Of The Indonesia-Malaysia)". 3, 12.
- Dollah, R. (2025). "Sekuritisasi, ekonomisasi dan dasar mengenai pendatang di Sabah (Securitization, economization and migration policy in Sabah)". (Issue April 2024).
- Fathussyakina, D. (2024). "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menyelesaikan Outstanding Boundary Problem Ri-Malaysia Segmen Pulau Sebatik Pada Periode 2018-2022". <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76771>
- Ghafur, M. F. (2016). "Ketahanan Sosial Di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik". *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 233-248.
- Kementerian Luar Negeri. (2023). *Laporan Peningkatan Keamanan dan Stabilitas di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia*.
- Kementerian Perindustrian. (2023). *Laporan Tahunan Program Pengembangan UMKM Perbatasan 2022*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025). *Pertemuan ke - 45 Joint RI - Malaysia*. <https://www.kemhan.go.id/strahan/2025/02/19/pertemuan-ke-45-joint-ri-malaysia.html>

- Kurnia, M. P. (2018). "Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan". *Jurnal Supremasi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.372>
- Marbun, S. F., Medan, U. N., Ardian, P., Zega, N., Medan, U. N., Aini, A. N., Medan, U. N., Sihotang, R. U., Medan, U. N., Anggoro, R., & Medan, U. N. (2025). "Analisis Penyebab Berlarutnya Sengketa Perbatasan Indonesia- Malaysia di Pulau Sebatik dalam Prespektif Hukum Internasional". 1(6).
- Marwasta, D. (2016). "Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 1(2), 204. <https://doi.org/10.22146/jpkm.10607>
- Nalindro, N., Runturambi, A. J. S., Kurniawan, H. F., & Mandira, I. M. C. (2022). "Peran Kepolisian Dalam Penindakan Kejahatan Lintas Negara Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia". *Journal Publicuho*, 5(4), 1139-1148. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.39>
- Nugroho, A. S. (2024). "Pemetaan Organisasi Ruang Pulau Sebatik Dalam Mendukung Kawasan Strategis Nasional Bidang Pertahanan Dan Keamanan". 8(1), 70-82.
- Nugroho, A. S., Rijanta, R., Santoso, P., & Marfai, M. A. (2023). *Hubungan Dinamika Sosial Ekonomi Wilayah dengan Interaksi Ruang*.
- Ramli, D., Amrullah, M., Adi, J., Eko, P. J., & Nordin, S. (2024). "Exploring the Interdependence Model in Malaysia-Indonesia Relations: Insights from Sabah, Malaysia". 32(1), 213-237.
- Sarjono, F., Khalid, K. A. T., & Chan, R. S. K. (2022). "The smokol phenomenon in Malaysia-Indonesia cross-border informal trade at Sebatik island". *JATI-Journal of Southeast Asian Studies*, 27(2), 48-72.
- Siburian, R. (2012). "Pulau Sebatik: Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia". *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 14(1), 54. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/download/87/68/165>
- Siregar, C. N., Rahmansyah, S., & Saepudin, E. (2020). "Ancaman Keamanan Nasional Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Pulau Sebatik Dan Tawau (Indonesia-Malaysia)". *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4(1), 26. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.23933>
- Soesilowati, S. (2014). "Sekuritisasi "Manusia Perahu": Efektifkah?" *Jurnal Global Dan Strategis*, 8(1), 125-146. <https://journal.unair.ac.id/JGS@sekuritisasi-'manusia-perahu'--efektifkah-article-7702-media-23-category-8.html>
- Trihartono, A., Indriastuti, S., & Nisya, C. (2020). "Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional". In *Melvana Publishing* (Issue 8). [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99470/Artikel 4 Agus Tri.pdf](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99470/Artikel%204%20Agus%20Tri.pdf)
- Yudhistira, A. O. (2022). "Sekuritisasi dan Human Security". *Security*, December, 1-7. <https://www.researchgate.net/publication/366619135>